

DAFTAR PUSTAKA

- Djazoeli Sadhani, 2005, *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*, [online], tersedia://www.bisnisindonesia.com[23 Mei 2005].
- Djoned Gunadi M, 2005. *Administrasi Perpajakan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak RI.2012. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/2012 tentang Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada KPP di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus dan KPP Madya*.
- . 2012. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ./2012 tanggal 23 November 2012 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012-2014..*
- . 2012. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/2012 tentang Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada KPP di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus dan KPP Madya*.
- . 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- . 2008. *Keputusan Dirjen Pajak KEP-16/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak dan Pelaporan Usaha Bagi PKP Dalam Hal Perubahan Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Madya Medan..*
- . 2008. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-filing)*.
- . 2007. *Keputusan Dirjen Pajak KEP-19/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada KPP Madya Medan*.
- . 2007. *Keputusan Dirjen Pajak KEP-55/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada KPP Madya Medan*.
- . 2002. *Keputusan Dirjen Pajak KEP-383/PJ./2002 tentang Tata Cara Dalam Penggunaan Aplikasi e-SPT*.

- Direktorat Perbendaharaan RI. 2006. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.*
- Keban, Yeremias T. PhD. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Keuangan RI. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 Tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 2012.*
- . 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*
- . 2007. *Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007.*
- . 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara.*
- Liberti Pandiangan, 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan,* Jakarta : PT Elex Media Komputindo(kelompok gramedia).
- Lumbantoruan, 1997. Sophar, *Ensiklopedi Perpajakan,* Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan,* Andi Offset, Jogjakarta.
- Nasucha, Chaizi, Dr.,2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Prof. Dr. Gunadi, MSc., 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan* (Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Safri Nurmantu, 2005. *Pengantar Perpajakan,* Jakarta: Granit.
- Siti Kurnia Rahayu, 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal,* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi, 2007. *Perpajakan Studi & Kasus,* Jakarta : Salemba Empat.

- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- , 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- , 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Ita Salsalina Lingga, 2009. *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya*, Bandung
- Umi Narimawati, 2007, *Teknik-teknik Analisis Multivariat*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Wardiana, 2007 *Teknologi Informasi*, tersedia: <http://www.informatika.lipi.go.id>, 2007.

KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PENERAPAN e-SPT TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT WAJIB PAJAK (SURVEY TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BARU TERDAFTAR DI KPP MADYA MEDAN TAHUN 2012)

Para Responden di Tempat

Dengan Hormat,

Saya bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan e- SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Wajib Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Yang Baru Terdaftar Di KPP Madya Medan Tahun 2012)**. Penelitian ini semata-mata digunakan untuk kepentingan akademis yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan system administrasi perpajakan modern yang berbasis teknologi khususnya terkait dengan penerapan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing terhadap efisiensi pengisian SPT Wajib Pajak. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum atau pihak manapun, Untuk itu kami mohon agar Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar hasil akhirnya dapat mencerminkan yang sebenarnya dan kendala-kendala yang dialami akan menjadi masukan bagi perbaikan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak.

Demi ketepatan waktu penyelesaian penelitian ini, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini dan mengirimkannya kembali kepada kami melalui email : wartadeakiel@gmail.com

Demikian surat permohonan kami. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian sebagai responden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Warta Sembiring

1. DATA RESPONDEN

- a. Nama Wajib Pajak :
Nama Personil :
(mewakili Wajib Pajak)
- c. Jabatan dalam perusahaan :

2. PETUNJUK PENGISIAN

- Silakan Bapak/Ibu menjawab dengan kondisi setelah menggunakan e-SPT.
- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang paling anda anggap sesuai , dalam pengisian kuesioner ini tidak ada jawaban yang benar atau salah.
- Bapak/ibu dipersilahkan memilih salah satu pilihan dari lima pilihan jawaban yang tersedia yaitu:

5 = Sangat Setuju (SS)

4 = Setuju (S)

3 = Ragu Ragu (RR)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

1. DAFTAR PERTANYAAN

Vaiabel Independen (X)						
No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
	Urgensi di terapkannya e-SPT	5	4	3	2	1
1	e-SPT merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada Wajib Pajak.					
2	Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan perhitungan SPT, tidak mungkin lagi dapat diminimalisir dengan sistem SPT manual					
3	Bagi Wajib Pajak yang menerbitkan dokumen-dokumen pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pelaporan SPT melalui media elektronik (CD, Flash Disk) menjadi sangat dibutuhkan.					
4	Perekaman data SPT oleh Wajib Pajak dengan menggunakan sistem SPT manual menghabiskan waktu yang relatif lama.					

Tujuan Penerapan e-SPT					
5	Dengan adanya e-SPT, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT)				
6	Dengan adanya e-SPT, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak				
7	Dengan adanya e-SPT, dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data.				
8	Dengan adanya e-SPT, data perpajakan Wajib Pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.				
Sosialisasi kepada Wajib Pajak					
9	Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada Wajib Pajak.				
10	Wajib Pajak telah memahami manfaat dan tujuan penerapan e-SPT tersebut bagi mereka				
11	Dengan adanya sosialisasi tersebut, Wajib Pajak cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT.				
Kendala dalam penerapan e-SPT					
12	Sarana dan prasarana di KPP Pratama Majalaya tempat WP terdaftar cukup memadai dalam rangka penerapan e-SPT.				
13	Layanan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP (<i>Application Service Provider</i>) dengan sistem DJP dalam aplikasi e-SPT telah disediakan oleh ASP selaku penyedia jasa aplikasi.				
14	Para fiskus di KPP Pratama Majalaya telah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem e-SPT.				

Vaiabel Dependen (Y)					
Kecepatan					
15	Dengan adanya e-SPT, kesalahan dalam penghitungan dapat dengan cepat diketahui.				
16	Dengan adanya e-SPT, dapat dilakukan penghematan waktu dalam penghitungan dan pelaporan SPT.				
Keakuratan					
17	Dengan adanya e-SPT, jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang.				
18	Dengan adanya e-SPT, keakuratan data dalam pengisian SPT lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang.				
Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan					
19	Dengan adanya e-SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis.				
20	Dengan adanya e-SPT, dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada proses pengisian dan pelaporan SPT.				